

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Konflik SDA antara Masyarakat dengan Perusahaan air (Studi Kasus Konflik SDA Desa Kajar Kabupaten Kudus) dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah

1. Penulis dapat menganalisis faktor penyebab Konflik SDA di Desa Kajar, yaitu (1) kurangnya sumber daya air, (2) Penurunan Penghasilan Petani (3) Tidak Ada Perda Tentang Sumber Daya Air, (4) Keresahan Masyarakat dengan Adanya Eksploitasi Air. Air merupakan sumber utama untuk mengairi sawah. Air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman terutama tanaman pada lahan basah. Namun keberadaan sumber air di Desa Kajar semakin terancam dengan adanya eksploitasi air yang disebabkan oleh aktivitas pengusaha air minum isi ulang. Akibat adanya eksploitasi ini sumber daya air makin berkurang dan warga kesulitan untuk mendapatkan sumber air sehingga penghasilan petani jadi berkurang. Hal tersebut yang dapat menimbulkan konflik karena adanya ketidakmerataan sumber daya.
2. Resolusi konflik sumber daya air yang sudah dilakukan diantaranya adalah (1) Pembentukan forum aspirasi, (2) Penindakan terhadap truk tangki oleh polisi, (3) Pembentukan Tim Resolusi Konflik, (4)

Pendekatan mediasi dan arbitrase. Namun hingga sekarang masih belum ada penyelesaian dari adanya konflik tersebut

3. Dampak yang ditimbulkan ada di beberapa sektor diantaranya sektor ekonomi, sosial, politik dan di sektor lingkungan.
4. Model Resolusi Konflik Sumber Daya Air di Desa Kajar untuk membangun perdamaian adalah Pembentukan Instrumen Hukum tentang Penanganan Konflik Sosial, Penerapan Manajemen Kolaborasi, dan Dialog antara pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kudus harus segera membuat perda mengenai pengelolaan sumber daya air sehingga tidak merugikan masyarakat
2. Berjalan baiknya hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Hubungan antar organisasi yang berjalan dengan baik. Pola koordinasi ini harus dimulai diantara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab
3. Dibentuknya sebuah manajemen kolaborasi yang menampung semua kepentingan dan aspirasi pihak-pihak yang terlibat, tentu pola kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kudus, DPRD Kabupaten Kudus, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus serta dinas-dinas terkait yang berurusan dengan pengelolaan air.

Pemerintah kabupaten Kudus perlu membuat mekanisme penyusunan manajemen, Monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan manajemen kolaborasi di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait. Staf pemerintah memerlukan keahlian baru guna penerapan pendekatan ini, sehingga mesti ada mekanisme penyebaran informasi dan menjalin hubungan koordinasi dengan pemegang ijin hak, masyarakat, serta instansi lain terkait.